

## **PUBLIC TRUST PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

### **PUBLIC TRUST ON LOCAL GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC**

**Khusnul Prasetyo<sup>1\*</sup>, Arimurti Kriswibowo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

\*Korespondensi: Khusnul Prasetyo. Email: khusnulprasetyo4@gmail.com

(Diterima: 05-05-2021; Ditelaah: 19-05-2021; Disetujui: 24-05-2021)

#### **ABSTRACT**

Public trust is a foundation on which the legitimacy of government is built, and it is essential to maintain the social cohesion. The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused the fears of declining the public trust on the government. This study aims to measure the level of public trust on the Government of Sidoarjo Regency in handling COVID-19 pandemic based on five policy dimensions that influence the public trust on the public institutions, namely responsiveness, reliability, integrity, openness, and fairness. This study uses a quantitative descriptive approach combined with a survey method design using questionnaires as research instrument. Samples of this study are taken from Y and Z generations. Sample sizes consist of 400 people based on the non-probability sampling drawn with a quota sampling technique. Data analysis uses the descriptive statistics by determining the central tendency. The results of this study indicate that the level of public trust on the Government of Sidoarjo Regency in handling COVID-19 pandemic based on the dimensions of responsiveness, reliability, and integrity is at a low level, whereas based on the dimensions of openness and fairness it receives a medium level of trust.

**Key words:** COVID-19 Pandemic, Local Government, Public Policy, Public Trust.

#### **ABSTRAK**

Kepercayaan publik merupakan fondasi dimana legitimasi pemerintah dibangun dan sangat penting untuk menjaga kohesi sosial. Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani COVID-19 dengan menggunakan lima dimensi kebijakan yang mempengaruhi kepercayaan publik pada lembaga publik, yaitu daya tanggap, keandalan, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain metode survei melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel penelitian diambil dari generasi Y dan generasi Z. Besaran sampel penelitian sebanyak 400 orang yang ditentukan secara *non-probability sampling* dengan teknik *quota sampling*. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan menentukan tendensi sentral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani pandemi COVID-19 berdasarkan dimensi daya tanggap, keandalan, dan integritas berada pada level rendah, sedangkan berdasarkan dimensi keterbukaan dan keadilan mendapatkan tingkat kepercayaan yang sedang.

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, Kepercayaan Publik, Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN

SARS-CoV-2 atau *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah menjadi pandemi yang melanda seluruh dunia. Awal penyebarannya dimulai dari Kota Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019 dan diklasifikasikan sebagai *public health emergency of international concern* oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 (Hui, dkk, 2020: 1). Puncak virus korona terjadi ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Putri, 2020). WHO sebagai garda lembaga kesehatan internasional terdepan dalam melawan COVID-19 telah melakukan inisiatif dalam mengingatkan dan menyediakan negara-negara cara melawan, memitigasi, dan menghindari penyebaran virus di negara masing-masing (WHO, 2020). Jumlah kasus dan kematian yang besar telah memberikan efek negatif bagi kondisi negara, baik di sektor ekonomi, keamanan, sosial, dan sektor lain yang membutuhkan produksi berkelanjutan.

Permasalahan penyediaan jasa kesehatan juga terlihat ketika pandemi melanda negara-negara di dunia, dengan keterlambatan respons pemerintah serta alat penunjang tes dan penanganan virus sukar dimiliki oleh beberapa negara, mengakibatkan penyebaran virus berkembang dengan sangat cepat. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas mendorong sebagian negara untuk melakukan *lockdown* demi menekan penyebaran virus, seperti Italia, Amerika Serikat, Spanyol dan hampir seluruh negara di dunia yang memiliki persentase kasus COVID-19 tinggi (BBC News Indonesia, 2020).

Di Indonesia sendiri, salah satu respons pertama yang diupayakan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 adalah dengan menginstruksikan kedutaan Indonesia di China agar memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan untuk dievakuasi (Gitiyarko, 2020). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menutup sementara penerbangan dari dan ke

daratan China mulai 5 Februari 2020 dan menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa *on arrival* untuk warga negara China. Pengawasan ketat jalur masuk dari negara lain ke Indonesia, tidak hanya pada bandara, namun juga meliputi pelabuhan dan pos lintas batas.

Indonesia memasuki babak baru dalam pencegahan virus korona setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang di Indonesia positif terjangkit COVID-19. WNI tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Setelah pengumuman ini, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan *panic buying*. Penanganan cepat diusahakan oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2020. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan, seperti penambahan rumah sakit rujukan COVID-19, peresmian Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit darurat COVID-19 serta membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi COVID-19 di Pulau Galang Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus melayangkan surat kepada Presiden Jokowi agar Pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi COVID-19 melalui deklarasi darurat nasional. Presiden Jokowi menanggapi surat tersebut dengan siaran pers di Istana Bogor pada hari yang sama dengan mengajak masyarakat untuk *work from home*, *study from home*, dan *worship from home* serta menerbitkan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) per 31 Maret 2021. Sejak itulah, pemerintah pusat mengampanyekan protokol kesehatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional juga dikeluarkan oleh Presiden akibat desakan dari berbagai pihak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku mulai 1 April 2020 juga diterbitkan karena semakin meningkatnya angka kasus COVID-19 dan sebagai upaya perlindungan terhadap warga dari risiko penularan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Riana & Sugiharto, 2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan 6 poin utama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat berhenti secara gradual (Widiyani, 2020).

Tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akhirnya stagnan akibat adanya PSBB. Diproyeksikan oleh Bank Dunia pada awal Juni 2020, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0 persen pada tahun 2020. Bahkan, skenario terburuknya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengalami minus hingga 3,5 persen. Untuk mencegah kondisi ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah mulai berpikir untuk melakukan relaksasi terhadap pembatasan sosial.

Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar tatanan kehidupan baru (*new normal*) disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat (Ihsanuddin & Gabrillin, 2020).

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ketika daerah memulai tatanan normal baru, hendaknya melalui tahapan-tahapan yang ekstra ketat dan penuh kehati-hatian. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan merupakan harapan dari adanya kebijakan tatanan normal baru (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Untuk mengatur mobilitas warga, pada tanggal 6 Juni 2020 Gugus Tugas mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lombok Post, 2020).

Setelah tatanan normal baru (*new normal*), mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 pemerintah membuat kebijakan baru yang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali. Alasan pemberlakuannya karena terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia setelah libur natal dan tahun baru (Dewi, 2021). Setelah PPKM Jawa-Bali, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro (PPKM Mikro) sampai tingkat RT/RW yang mulai diberlakukan tanggal 9-22 Februari 2021. Tujuan PPKM Mikro adalah untuk menekan angka COVID-19 agar kurva melandai sebagai kunci keberhasilan dalam penanganan COVID-19 sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021).

Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 (Madi, dkk, 2020: 1066), namun sayangnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan pada penurunan angka positif COVID-19. Penyebaran COVID-19 dan korban yang semakin hari semakin meningkat, mengindikasikan bahwa negara

belum optimal sehingga melahirkan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan ketidakpastian sosial. Hal tersebut berimplikasi pada tekanan psikologis masyarakat, timbul rasa tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah, dan bahkan melahirkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah.

Kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 hilang karena sejak awal publik menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak konsisten. Survei yang dilakukan oleh Indo Barometer pada tanggal 12-18 Mei 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 53,8 persen masyarakat tidak puas terhadap kebijakan penanganan masalah wabah COVID-19 oleh pemerintah (Budilaksono & Iskandar, 2020). Survei Indo Barometer juga diperkuat oleh Peneliti Indef-Datalyst Center Imam Akbar Rachbini yang mengumumkan hasil riset opini masyarakat seputar penanganan COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat belum percaya secara penuh pada sistem data pemerintah (Fuad, 2020).

*Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) juga memaparkan berbagai isu yang paling banyak diperbincangkan pada masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan 56 persen sentimen negatif pada isu Jaring Pengaman Sosial (JPS), 81 persen sentimen negatif pada isu Kartu Prakerja, 84 persen sentimen negatif pada isu pengangguran akibat dampak pandemi, 79 persen sentimen negatif pada isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 54 persen sentimen negatif pada isu ketidaktegasan larangan mudik 2020 (Herman, 2020). Suatu kebijakan publik berpotensi gagal apabila kebijakan tersebut tidak dipahami oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, secara teoritis sebaiknya kebijakan publik wajib dikonseptualisasikan secara jelas dan detail, kemudian disosialisasikan sebagai tahap awal dari kebijakan publik.

Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memperburuk ketidaksetaraan yang ada, mulai dari polarisasi masyarakat

hingga kerentanan sosial. Langkah-langkah pemulihan dampak COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah setidaknya memiliki dampak pada kepercayaan publik meskipun masih muncul kekhawatiran penurunan kepercayaan (OECD, 2020). Menurut Van de Walle, dkk, (2008: 2), kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah telah banyak diperbincangkan di berbagai negara dan menjadi elemen permanen dari wacana politik kontemporer. Perhatian ini juga meluas ke tingkat kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kepercayaan publik merupakan fondasi dimana legitimasi lembaga publik dibangun dan sangat penting untuk menjaga kohesi sosial. Kepercayaan publik amat menunjang keberhasilan berbagai kebijakan publik yang bergantung pada respons perilaku dari publik (OECD, 2020). Kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkatkan penerimaan publik berupa kepatuhan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Widaningrum, 2017: 1).

Di Indonesia, abainya masyarakat terhadap himbauan-himbauan pemerintah seperti ajakan untuk menerapkan protokol kesehatan, menunjukkan bahwa adanya nuansa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, akibatnya kesadaran masyarakat maupun penerimaan terhadap kebijakan pemerintah masih rendah (Mas'udi & Winanti, 2020: 60). Hal ini dipertegas oleh Djalante, dkk (2020: 7) bahwa masyarakat juga semakin menjauh dari persepsi risiko yang diakibatkan oleh pandemi, kesadaran masih relatif rendah, meskipun himbauan ataupun anjuran pemerintah berupa protokol kesehatan telah didengarkan.

Pada saat pandemi, pemerintah pusat telah membuat berbagai kebijakan, aturan, standar, pedoman, dan kriteria dalam penanganan COVID-19, namun persoalan yang dihadapi justru bertumpu pada pemerintah daerah. Mulai dari penanganan warga terinfeksi positif COVID-19 hingga

permasalahan sosial masyarakat yang timbul akibat pandemi, semuanya terjadi di daerah. Ruang gerak pemerintah daerah juga terbatas karena pengaturan mengenai penanganan pandemi COVID-19 menitikberatkan pada kebijakan pemerintah pusat dan wajib diimplementasikan secara menyeluruh (Ariyanto, 2020: 40).

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur juga tidak luput dari kewajiban untuk melakukan upaya dalam mengurangi angka COVID-19 dan meminimalisasi dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, tentu saja mengacu pada kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 tercatat sebesar 2.282.220 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,45 persen (BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021: 336). Bersama dengan Gresik, Sidoarjo adalah salah satu penyangga utama Kota Surabaya yang masuk dalam kawasan Gerbangkertosusila (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2018). Selama pandemi COVID-19, daerah penyangga memiliki risiko besar terhadap masifnya penyebaran COVID-19. Pada hari Minggu, 12 April 2020, kasus COVID-19 di Jawa Timur naik cukup signifikan karena lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Surabaya dan tiga daerah penyangga, yaitu Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik (Hasibuan, 2020). Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Jawa Timur pada bulan April 2020 yang lalu menyebabkan isu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di Surabaya Raya mencuat karena berbagai desakan dari masyarakat, kawasan penyangga yakni Sidoarjo dan Gresik juga menjadi target pemberlakuan kebijakan tersebut (Pandia, 2020).

Pada 21 April 2020, usulan PSBB dari 3 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik (Surabaya Raya) telah disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan melalui Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020. Pemerintah berharap dengan adanya penerapan PSBB Surabaya Raya lebih efektif menurunkan angka COVID-19 di Jawa Timur (Rokom, 2020). Meski sudah tiga kali PSBB diberlakukan di Sidoarjo, penyebaran COVID-19 di Sidoarjo masih tetap tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kemudian memberlakukan jam malam sejak pukul 22.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Sejumlah ruas jalan ditutup untuk meminimalisasi mobilitas warga. Kebijakan tersebut diterapkan dengan pertimbangan masih banyaknya masyarakat yang berkerumun bahkan tanpa menggunakan masker dan menganggap kedisiplinan tidak lagi diperlukan setelah PSBB (Faizal & Belarminus, 2020).

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menjelaskan bahwa mobilitas (perpindahan penduduk) inilah yang menjadi penyebab penyebaran COVID-19. Semakin tinggi mobilitas penduduk cenderung akan semakin masif penyebaran virus. Sebaliknya, jika mobilitas di suatu daerah rendah, maka semakin kecil penyebarannya (Waseso & Winarto, 2020). Hingga 27 Oktober 2020, target Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjadikan zona penanganan COVID-19 dari oranye menjadi kuning belum terwujud. Zona wilayah Sidoarjo masih oranye karena salah satu indikator belum terpenuhi. Indikator yang kurang optimal dalam penanganan pandemi adalah semakin meningkat dan tingginya angka kematian (Ginanjari, 2020).

Peranan penting berupa *political will* yang dimainkan oleh lembaga publik sangat dibutuhkan di masa pandemi, karena berkaitan dengan kesediaan dan komitmen pemimpin untuk mencapai keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 (W. I. Azizah, dkk, 2020: 52), dan karena krisis seperti ini cenderung menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan, dan dapat menghasilkan apa yang dikenal sebagai *rally around the flag effect*, dimana para pemimpin politik mengalami lonjakan

persetujuan publik (Moxham-Hall & Strang, 2020). *Political will* diaktualisasikan ke dalam berbagai upaya yang dilakukan maupun kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berhasil atau gagalnya kebijakan publik untuk mencapai *goodness* secara efektif akan melahirkan *public trust* atau *public distrust*. Keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat (*strengthening*) kepercayaan publik, di sisi lain kegagalan kebijakan publik akan melemahkan, bahkan dapat meruntuhkan kepercayaan publik (Nugroho, 2018: 73). Menurut Van de Walle, dkk (2008: 5), kepercayaan publik ditimbulkan dari kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah itu sendiri. Penurunan kepercayaan publik pada pemerintah disebabkan karena pemerintah atau lembaga sektor publik gagal menjalankan pekerjaannya. *Output* dan *outcome* yang diharapkan di bawah standar, efisiensi dan efektivitas rendah, dan pemerintah gagal memenuhi apa yang dijanjikannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani pandemi COVID-19, sehingga nantinya dapat diketahui apakah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mempertahankan kepercayaan bahkan membangun kepercayaan yang lebih besar dengan masyarakat yang dilayaninya atau bahkan sebaliknya, mengingat pemerintah daerah telah berupaya keras mengendalikan kasus COVID-19. Untuk menunjukkan tingkat kepercayaan, peneliti akan mengukurnya melalui model pengukuran yang telah dirumuskan oleh OECD, yakni 5 (lima) dimensi kebijakan yang mempengaruhi kepercayaan pada lembaga publik. Dengan dimensi tersebut, OECD ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerintah, seperti integritas tingkat tinggi, keadilan, dan keterbukaan lembaga merupakan prediktor kuat dari kepercayaan publik. Demikian pula, kompetensi pemerintah seperti daya tanggap dan keandalannya dalam memberikan layanan publik dan mengantisipasi

perubahan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pada lembaga publik (OECD, 2017: 24).

## MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2019: 16), pendekatan kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian survei. Ditegaskan oleh Sugiyono (2019: 56) bahwa metode penelitian survei adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Effendi & Tukiran (2012: 24), ciri khas dari metode penelitian survei adalah data/informasi dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner.

Kuesioner penelitian berisikan 29 pertanyaan berdasarkan lima dimensi atau konstruk, yaitu daya tanggap (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), integritas (*integrity*), keterbukaan (*openness*), dan keadilan (*fairness*). Dimensi kepercayaan publik yang diterjemahkan ke dalam definisi operasional variabel diukur dalam skala ordinal dengan menggunakan *Likert's scale* menjadi lima skala poin respon: (1) sangat tidak percaya (STP); (2) tidak percaya (TP); (3) netral (N); (4) percaya (P); dan (5) sangat percaya (SP).

Responden penelitian adalah Generasi Y (Milenial) yang lahir pada tahun 1981-1996 dan Generasi Z yang lahir pada tahun 1997-2012 (BPS, 2021: 12). Menurut Wijoyo, dkk (2020: 26), Generasi Y (Milenial) memiliki karakteristik personal yang lebih terbuka dibandingkan generasi sebelumnya akibat pengaruh perkembangan teknologi, sedangkan Generasi Z disebut juga sebagai *iGeneration* (generasi internet) memiliki kelebihan di antaranya melek teknologi digital, cenderung toleran

dengan perbedaan kultur dan adaptif terhadap perubahan zaman (Wijoyo, dkk, 2020: 27). Responden pada penelitian ini berjumlah 400 orang setelah dilakukan perhitungan melalui Rumus Slovin dengan *margin of error* sebesar 5% (Sujarweni, 2014: 16).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling*. Menurut Sugiyono (2019: 131), *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dimana setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel tidak diberi peluang/kesempatan yang sama. Salah satu bentuk/jenis dari *non-probability sampling* adalah sampel kuota (*quota sampling*), inilah yang digunakan pada penelitian ini. Menurut Kuswana (2011: 152), *quota sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan dan digunakan apabila jumlah populasi dapat diketahui sebelumnya (Effendi & Tukiran, 2012: 172).

Untuk menjamin kelayakan data, maka instrumen harus valid dan reliabel. Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar dari Karl Pearson (Arikunto, 2010: 213). Harga  $r$  hitung yang diperoleh dari perhitungan dibandingkan dengan harga  $r$  pada tabel *product moment* dengan  $\alpha = 5\%$ . Dapat dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, dan dikatakan tidak valid jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel. Uji validitas instrumen alat ukur (kuesioner) dilakukan kepada 30 orang responden dari masing-masing wilayah dan dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi  $r$  table sebesar 0,361, sedangkan  $r$  hitung pada item pertanyaan 1 hingga 29 lebih besar dari  $r$  tabel, sehingga item pertanyaan yang digunakan adalah valid. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi angket. Alat ukur menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan membandingkan koefisien *alpha* ( $\alpha$ ) dengan 0,06. Jika koefisien *alpha* ( $r$  hitung)  $>$  0,06 maka item tersebut reliabel

(Arikunto, 2010: 221). Hasil uji reliabilitas dari 30 responden menunjukkan koefisien reliabilitas 0,967 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur adalah reliabel (kuesioner konsisten).

Data hasil penelitian yang valid dan reliabel dianalisis melalui statistik deskriptif dengan menentukan tendensi sentral. Untuk analisis, maka kategori disederhanakan menjadi tiga kategori dimana opsi jawaban 4 dan 5 menggambarkan kepercayaan tinggi (*high trust*), opsi jawaban 3 menggambarkan sedang/netral (*medium trust*), sedangkan opsi jawaban 1 dan 2 menggambarkan kepercayaan rendah (*low trust*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang kepercayaan publik (*public trust*) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penanganan pandemi COVID-19 ditunjukkan berdasarkan lima dimensi, yaitu daya tanggap (*responsiveness*), keandalan (*reliability*), integritas (*integrity*), keterbukaan (*openness*), dan keadilan (*fairness*).

Pada dimensi daya tanggap (*responsiveness*), sebanyak 203 responden (50,8%) menunjukkan tingkat kepercayaan rendah, 174 responden (43,5%) menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, dan 23 responden (5,3%) menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi (Tabel 1).

Tabel 1. Frekuensi Dimensi Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Tingkat Kepercayaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	203	50.8	50.8	50.8
Sedang	174	43.5	43.5	94.3
Tinggi	23	5.8	5.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

Daya tanggap (*responsiveness*) dalam penelitian ini menanyakan tentang sejauhmana masyarakat percaya bahwa pemerintah memiliki kecepatan dalam menyelesaikan keluhan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi saat ini serta

kualitas pelayanan publik yang buruk (Murtin, dkk, 2018: 44). Hasil survei tentang tingkat kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dimensi daya tanggap (*responsiveness*) didominasi oleh tingkat kepercayaan rendah dengan persentase sebesar 50,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa aspek seperti daya tanggap (kecepatan/kepekaan) pemerintah daerah dalam menangani COVID-19, kemampuan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menangani COVID-19, hasil kebijakan memuaskan atau memenuhi atau merespon kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19, pemberian kemudahan akses pelayanan publik dalam masa pandemi COVID-19, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi/*feedback* (umpan balik) dari masyarakat selama pandemi COVID-19 tidak mampu dihadirkan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pada dimensi keandalan (*reliability*), sebanyak 226 responden (56,5%) menunjukkan tingkat kepercayaan rendah, 156 responden (39%) menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, dan 18 responden (4,5%) menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi (Tabel 2).

Tabel 2. Frekuensi Dimensi Keandalan (*Reliability*)

Tingkat Kepercayaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	226	56.5	56.5	56.5
Sedang	156	39.0	39.0	95.5
Tinggi	18	4.5	4.5	100.0
Total	400	100.0	100.0	

Persepsi mengenai keandalan (*reliability*) berkaitan dengan sejauhmana masyarakat berpikir bahwa pemerintah akan memberikan dukungan yang memadai dalam konteks bencana alam, khususnya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini (Murtin dkk., 2018: 46). Pada dimensi keandalan, kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh tingkat kepercayaan rendah dengan persentase sebesar 56,5%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mampu beradaptasi, mengantisipasi COVID-19 dan belum efektif memamanajementi ketidakpastian sosial, ekonomi dan politik selama masa pandemi COVID-19, belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap warga Sidoarjo dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi tidak konsisten dalam penerapannya.

Pada dimensi integritas (*integrity*), sebanyak 236 responden (59%) menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, 145 responden (36,3%) menunjukkan tingkat kepercayaan rendah, dan 19 responden (4,8%) menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi (Tabel 3).

Tabel 3. Frekuensi Dimensi Integritas (*Integrity*)

Tingkat Kepercayaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	145	36.3	36.3	36.3
Sedang	236	59.0	59.0	95.3
Tinggi	19	4.8	4.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

Nilai-nilai pemerintah, khususnya integritas tingkat tinggi dari politisi (*policy maker*) menjadi penentu kuat dan terpenting dari kepercayaan publik pada pemerintah (Murtin, dkk, 2018: 43). Pada dimensi integritas (*integrity*), kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh tingkat kepercayaan sedang dengan persentase sebesar 59%. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum berkomitmen secara penuh dalam upaya pemberantasan korupsi selama pandemi COVID-19, tidak konsisten terhadap dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi COVID-19, belum mampu menangani konflik kepentingan dengan baik selama pandemi COVID-19, tidak memanfaatkan kewenangan sebagai-mana mestinya, belum mampu bertanggung jawab secara penuh dalam menangani pandemi COVID-19, dan tidak memiliki standar perilaku yang tinggi dalam menangani pandemi COVID-19.

Pada dimensi keterbukaan (*openness*), sebanyak 207 responden (51,8%) menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, 178 responden (44,5%) menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi, dan 15 responden (3,8%) menunjukkan tingkat kepercayaan rendah (Tabel 4).

Tabel 4. Frekuensi Dimensi Keterbukaan (*Openness*)

Tingkat Kepercayaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	15	3.8	3.8	3.8
Sedang	207	51.8	51.8	55.5
Tinggi	178	44.5	44.5	100.0
Total	400	100.0	100.0	

Keterbukaan (*openness*) mengacu pada sejauhmana masyarakat berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan ketika keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mempengaruhi komunitasnya (Murtin, dkk, 2018: 44). Pada dimensi keterbukaan, kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh tingkat kepercayaan sedang dengan persentase sebesar 51,8%. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mampu memberikan informasi yang memadai mengenai COVID-19, informasi yang disampaikan tidak jelas dan tidak lengkap, tidak mudah dipahami dan susah diakses oleh masyarakat, masyarakat belum menerima secara penuh kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19, belum menjamin adanya transparansi dalam penanganan pandemi COVID-19, dan belum mampu memberikan peluang adanya keterlibatan stakeholder baik masyarakat, swasta, akademisi dan media dalam pengambilan keputusan/perumusan kebijakan penanganan COVID-19 di daerah.

Pada dimensi keadilan (*fairness*), sebanyak 227 responden (56,8%) menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, 86 responden (21,5%) menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi, dan 57 responden (14,3%) menunjukkan tingkat kepercayaan rendah (Tabel 5).

Tabel 5. Frekuensi Dimensi Keadilan (*Fairness*)

Tingkat Kepercayaan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Rendah	26	6.5	6.5	6.5
Sedang	227	56.8	56.8	63.3
Tinggi	147	36.8	36.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

Keadilan (*fairness*) berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan kelompok masyarakat tertentu akan diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya oleh pemerintah (Murtin, dkk, 2018: 74). Kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dimensi keadilan didominasi oleh tingkat kepercayaan sedang dengan persentase sebesar 56,8%. Sehingga dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan perlakuan yang konsisten/sama kepada warganya dan sektor swasta (bisnis) selama masa pandemi COVID-19, belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, dan tidak optimal dalam melakukan perbaikan kondisi hidup warga negara demi mengatasi dampak yang disebabkan karena pandemi COVID-19.

Hasil penelitian OECD sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pemerintah dianggap relatif terbuka, adil, dan dapat diandalkan, namun masyarakat lebih pesimis dalam hal ketanggapan dan integritas kelembagaan. Sebagian besar responden tampaknya percaya bahwa pejabat pemerintah kemungkinan besar akan menerima suap (imbalan politik) yang menggadaikan integritas (Murtin, dkk, 2018: 42). Namun penelitian ini menunjukkan trend yang berbeda. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo cenderung memiliki kepercayaan yang rendah pada pemerintah daerahnya untuk dimensi daya tanggap (*responsiveness*), dimensi keandalan (*reliability*), dan dimensi integritas (*integrity*). Sedangkan pada dimensi keterbukaan (*openness*) dan keadilan (*fairness*) cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang sedang. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena belum tentu dapat digene-

ralisasikan pada daerah lainnya, disebabkan hanya menggunakan satu kota/kabupaten sebagai sampel, yakni Kabupaten Sidoarjo. Pada dasarnya setiap daerah akan mendapatkan hasil tingkat kepercayaan yang berbeda-beda bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi lima dimensi kebijakan yang mempengaruhi kepercayaan publik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Survei dengan menggunakan 400 responden dari Kabupaten Sidoarjo pada Generasi Milenial (Y) dan Generasi Z menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cenderung rendah pada dimensi daya tanggap (responsivitas), keandalan, dan integritas. Sedangkan pada dua dimensi lainnya, yaitu keterbukaan dan keadilan, cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan sedang.

Rendah tingginya tingkat kepercayaan pada prinsipnya bergantung pada *political will* yang dimiliki oleh pemimpin daerah berupa kebijakan maupun upaya konkret dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan mewujudkan lima dimensi atau konstruk yang dijadikan sebagai landasan dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Ketika kepercayaan publik tinggi, maka akan dibarengi dengan pemerintah yang kompeten dalam menyediakan layanan publik yang mudah diakses, efisien dan berorientasi pada masyarakat yang secara efektif memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta adaptif seiring dengan perubahan kebutuhan dan ekspektasi.

Pemerintah yang kompeten juga akan memastikan tingkat keandalan dan prediktabilitas yang tinggi, meminimalkan ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik warganya. Pemerintah *is values-based* akan mempromosikan integritas melalui penyelarasan lembaga publik dengan standar perilaku yang tinggi dan berjanji untuk melindungi kepentingan

publik, komitmen pada pemberantasan korupsi dan berusaha untuk memastikan keadilan dalam proses dan hasil kebijakan publik. Pemerintah *is values-based* juga akan menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. Apabila kepercayaan rendah, maka terjadi sebaliknya.

### Rekomendasi

Beberapa keterbatasan dapat ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan ke populasi lain, mengingat kepercayaan masyarakat pada setiap daerah tentu berbeda bergantung pada *political will* pemimpinnya. *Kedua*, lokasi penelitian masih terlalu sempit pada level kota/kabupaten, peneliti berharap terdapat penelitian lebih lanjut untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada pemerintah dalam penanganan pandemi pada level nasional agar diperoleh data secara makro. *Terakhir*, dengan metode survei *online*, penelitian ini tidak dapat menjangkau jumlah partisipan/responden secara proporsional di setiap generasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif amat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Effendi, S., & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei* (32nd ed.). LP3ES.
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Setia.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed.). Gadjah Mada University Press. <https://digitalpress.ugm.ac.id/book/257>.

- Moxham-Hall, V., & Strang, L. (2020). Public Opinion and Trust in Government During a Public Health Crisis. *King's College London*. <https://www.kcl.ac.uk/news/public-opinion-and-trust-in-government-during-a-public-health-crisis>.
- Murtin, F., Fleischer, L., Siegerink, V., Aassve, A., Algan, Y., Boarini, R., Gonzalez, S., Lonti, Z., Grimalda, G., Vallve, R. H., Kim, S., Lee, D., Putterman, L., Smith, C., ... V. S.-O. S., 2018, U., Siegerink, V., Aassve, A., Algan, Y., ... 2018, U. (2018). Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment. In *OECD Statistics Working Papers, No. 2018/02*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/869ef2ec-en>.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Edisi 6 (Y. Masda (ed.); 6th ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Wijoyo, H., Indrawan, I., Cahyono, Y., Handoko, A. L., & Santamoko, R. (2020). *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*. CV. Pena Persada.
- Jurnal**
- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 37–57.
- Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, 1(1), 50–62. <http://www.jsep.org/index.php/jsep/article/view/6>.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6(100091), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Hui, D. S., I Azhar, E., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., Ippolito, G., Mchugh, T. D., Memish, Z. A., Drosten, C., Zumla, A., & Petersen, E. (2020). The Continuing 2019-nCoV Epidemic Threat of Novel Coronaviruses to Global health — The latest 2019 Novel Coronavirus Outbreak in Wuhan, China. *International Journal of Infectious Diseases*, 91, 264–266. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009>.
- Madi, M., Hadiwidodo, Y. S., Tuswan, T., & Ismail, A. (2020). Analisis Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan AutoCAD Online untuk Pengabdian Masyarakat Terdampak Covid-19 dengan Metode Kirkpatrick Level I. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 1065–1076. <https://doi.org/10.30653/002.202054.689>.
- OECD. (2017). *Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust*. Public Governance Reviews, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264268920-6-en>.
- OECD. (2020). *Webinar Series: Building a New Paradigm for Public Trust*. OECD.Org. <http://www.oecd.org/fr/gov/webinar-series-building-a-new-paradigm-for-public-trust.htm>.
- Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., & Bouckaert, G. (2008). Trust in the public sector: Is there any evidence for a long-term decline? *International Review of Administrative Sciences*, 74(1), 47–64. <https://doi.org/10.1177/0020852307085733>.

Widaningrum, A. (2017). Public Trust and Regulatory Compliance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.22146/jsp.28679>.

### Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### Laman

BBC News Indonesia. (2020). *Virus corona: Bagaimana "lockdown" dan berbagai langkah pencegahan lain diterapkan di dunia?* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51927841>.

BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus->

<penduduk-2020.html>.

BPS Kabupaten Sidoarjo. (2021). *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e3e10d819e0bbfe5353dbbd/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2021.html>.

Budilaksono, I., & Iskandar, M. A. (2020). Survei rekomendasikan pemerintah ubah kinerja tangani COVID-19. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1515325/survei-rekomendasikan-pemerintah-ubah-kinerja-tangani-covid-19>.

Dewi, F. S. (2021). Bukan PSBB, Pemerintah Terapkan PPKM di Jawa-Bali untuk Kendalikan COVID-19. *Bisnis.Com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210107/15/1339772/bukan-psbb-pemerintah-terapkan-ppkm-di-jawa-bali-untuk-kendalikan-covid-19>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. (2018). *Tentang Sidoarjo*. Portal.Sidoarjokab.Go.Id. <http://portal.sidoarjokab.go.id/geografis#:~:text=Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu,dikemas dengan baik dan terarah.>

Faizal, A., & Belarminus, R. (2020). Tekan Covid-19, Jam Malam Diberlakukan di Sidoarjo, Sejumlah Jalan Ditutup. *Kompas.Com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2020/07/06/23074701/tekan-covid-19-jam-malam-diberlakukan-di-sidoarjo-sejumlah-jalan-ditutup?page=all>.

Fuad, H. (2020). Riset: Kepercayaan Masyarakat Rendah terhadap Pemerintah Tangani Corona. *Sindonews.Com*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1579360/15/riset-kepercayaan-masyarakat-rendah-terhadap-pemerintah-tangani-corona?showpage=all>.

Ginanjari, D. (2020). Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Zona Sidoarjo Belum Bisa Kuning. *JawaPos.Com*. <https://www.>

- [jawapos.com/surabaya/28/10/2020/angka-kematian-covid-19-tinggi-zona-sidoarjo-belum-bisa-kuning/](http://jawapos.com/surabaya/28/10/2020/angka-kematian-covid-19-tinggi-zona-sidoarjo-belum-bisa-kuning/).
- Gitiyarko, V. (2020). Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19. *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.
- Hasibuan, R. (2020). Waspada! Corona Melonjak di 3 Daerah Penyangga Surabaya. *Barometerjatim.Com*. <https://www.barometerjatim.com/waspada-corona-melonjak-di-3-daerah-penyangga-surabaya/>.
- Herman. (2020). Riset Indef: Kebijakan Pemerintah Terkait Covid-19 Lebih Banyak Direspons Negatif. *Beritasatu.Com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/625401/riset-indef-kebijakan-pemerintah-terkait-covid19-lebih-banyak-direspons-negatif>.
- Ihsanuddin, & Gabrillin, A. (2020). Jokowi Instruksikan Sosialisasi New Normal secara Masif. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/10495691/jokowi-instruksikan-sosialisasi-new-normal-secara-masif>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait Wabah COVID-19*. Kemlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>.
- Lombok Post. (2020). *Ngebet New Normal, Pemerintah Longgarkan Aturan Bepergian*. <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/10/06/2020/ngebet-new-normal-pemerintah-longgarkan-aturan-bepergian/>.
- Pandia, A. S. (2020). PSBB Surabaya Dikoordinasikan dengan Daerah Penyangga. *Kompas*. <https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/04/24/psbb-surabaya-dikoordinasikan-dengan-daerah-penyangga/>.
- Putri, G. S. (2020). WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- Riana, F., & Sugiharto, J. (2020). Cegah Covid-19 Jokowi Terbitkan PP tentang PSBB, Simak Isinya. *TEMPO.CO*. <https://nasional.tempo.co/read/1326165/cegah-covid-19-jokowi-terbitkan-pp-tentang-psbb-simak-isinya/full&view=ok>.
- Rokom. (2020). Menkes Setujui Usulan PSBB 3 Kabupaten/Kota di Jatim. *Sehat Negeriku, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200421/4533735/menkes-setujui-usulan-psbb-3-kabupatenkota-jatim/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020a). 5 Arahkan Presiden Menuju Tatanan Baru Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/5-arahan-presiden-menuju-tatanan-baru-masyarakat-produktif-dan-aman-covid-19/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020b). Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *Tekan Kasus COVID-19, Pemerintah Terapkan PPKM Berbasis Mikro Mulai 9 Februari*. <https://setkab.go.id/tekan-kasus-covid-19-pemerintah-terapkan-ppkm-berbasis-mikro-mulai-9->

februari/.

- Waseso, R., & Winarto, Y. (2020). Pakar Epidemiologi: Mobilitas Penduduk jadi Faktor Bertambahnya Kasus COVID-19. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pakar-epidemiologi-mobilitas-penduduk-jadi-faktor-bertambahnya-kasus-covid-19>.
- WHO. (2020). *Rolling Updates on Coronavirus Disease (COVID-19)*. Who.Int. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen>.
- Widiyani, R. (2020). Ini Enam Inti Aturan PSBB Serta Sanksi di Beberapa Wilayah. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4984195/ini-enam-inti-aturan-psbb-serta-sanksi-di-beberapa-wilayah>.